

**MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
DESA TINTING BOYOK KECAMATAN SEKADAU HULU**

Oleh:
DEPI SISIANTO
NIM. E42010065

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat. 2015

E-mail : xxxlost@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, hanya saja dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Tinting Boyok masih belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien. Lemahnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa. Namun secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Desa Tinting Boyok masih dikatakan wajar, hanya saja masih perlu pembenahan dari Sumber Daya Manusia Pemerintahan di Desa Tinting Boyok.

Kata-kata kunci : Proses, Pengelolaan, dan Pembangunan

**THE FINANCIAL MANAGEMENT OF BUDGET DRAFTING IN TINTING
BOYOK VILLAGE, SEKADAU HULU SUB-DISTRICT, SEKADAU
REGENCY**

By:
DEPI SISIANTO
NIM. E42010065

*Science of government program, Faculty of social and political science,
Tanjungpura University in cooperation with The Government of
West Kalimantan. 2015
E-mail : xxxlost@ymail.com*

Abstract

This essay describe and analyze the process of budget drafting in Tinting Boyok village, Sekadau Hulu sub-district, Sekadau regency.. This research is an descriptive model by using qualitative approach.. The result of this research shows that the process of budget drafting in Tinting Boyok village went well base on the law made by regional government. Only, in financial management, the government of Tinting Boyok can not manage the financial effectively and efficiently. That caused by the human resource of Tinting Boyok government is at the minimum level so they can not manage it well.. But, as a whole, the financial management is good, only, they need to improve the human resource of the government in Tinting Boyok village

Keywords : Process, Management, and Developemet

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3). Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan di desa telah mengalami perubahan. Pada masa orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam masalah pengelolaan keuangan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan harapan baru kepada tata kelola desa (Pasal 212) yang termasuk didalamnya adalah tata kelola keuangan desa, meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sistem pengelolaan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 masih menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, dikarenakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih pada tahap sosialisasi dan belum terbentuk turunannya berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Namun sering kali terjadi dalam pelaksanaannya, timbul kendala-kendala berkaitan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut. Berbagai fenomena timbul sebagai akibat dari manajemen perencanaan pada tahap Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang diterapkan oleh pejabat desa yang berwenang mengatur dan mengelola keuangan desa yang masih belum

sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah diatur dalam peraturan menteri maupun pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Peraturan Bupati dan sistem pengelolaannya sudah mendapatkan pengarahannya dari pihak Kecamatan ataupun Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Desa bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau, berkaitan dengan tata kelola keuangan desa. Namun masalah dilapangan berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa. Tidak semua perangkat di desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik, khususnya Desa Tinting Boyok yang termasuk sebagai desa yang berada di daerah terpencil dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Adapun masalah umum Manajemen Keuangan Desa dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok yang kerap muncul

adalah masih lemahnya perencanaan pengelolaan keuangan desa dari pejabat desa yang berwenang, serta masih belum sesuai dengan prosedur standar perencanaan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah daerah. Fenomena-fenomena masalah perencanaan keuangan kerap kali terjadi di desa, khususnya desa-desa terpencil seperti Desa Tinting-Boyok yang masih kekurangan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan managerial mengelola keuangan, yaitu Kepala Desa yang dilimpahkan kepada Sekretaris Desa untuk melakukan Pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan kepada aparatur desa yang kurang mengerti sistem penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan secara benar.

Dari segenap pemaparan berkaitan dengan permasalahan Perencanaan keuangan desa seperti dijelaskan tersebut diatas, masalah penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi kunci dari timbulnya berbagai fenomena-fenomena berkaitan dengan

tata kelola keuangan desa. Salah satu fenomena yang timbul akibat tidak berjalannya fungsi manajemen perencanaan dengan baik adalah laporan pertanggungjawaban keuangan desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur pembuatan Perdes APBDes. Fungsi perencanaan dalam mengelola administrasi keuangan desa masih berjalan lambat, sehingga akibat yang timbul adalah Alokasi Dana Desa tidak dapat diberikan tepat pada waktunya, dan tentunya berimbas dengan pembangunan di desa tersebut.

Desa Tinting Boyok merupakan salah satu desa di Kabupaten Sekadau yang kerap terjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan APBDes. Hal tersebut terjadi sebagai akibat belum berjalannya fungsi manajemen oleh pemerintah desa yang berwenang mengatur dan mengelola keuangan desa. Selain itu desa Tinting Boyok aksesnya lebih mudah dijangkau karena

tidak jauh dari pusat kabupaten Sekadau.

Adapun alasan peneliti menjadikan Desa Tinting Boyok sebagai Lokus Penelitian diantaranya adalah :

- a. Pembangunan masih belum berjalan dan memenuhi target sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Fenomena berupa keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam bentuk APBDes Periode ke 2 (dua) yang seharusnya diselesaikan pada November 2013, namun sampai Januari 2014 laporan tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak Pemerintah Desa Tinting Boyok.
- c. Kurangnya pemahaman pemakai anggaran (pejabat yang berwenang) dalam mengelola anggaran, seperti penyusunan anggaran kebutuhan belanja,

pengelolaan keuangan sampai dengan pelaporan.

- d. Pada kasus yang terjadi di Desa Tinting Boyok, timbul sebuah fenomena sebagai akibat dari manajemen keuangan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang benar yaitu, pembekuan anggaran dalam bentuk Alokasi Dana Desa dari pihak pemberi (Kabupaten) kepada pihak Penerima (Desa) pada periode ke 2 (dua) Tahun 2013 yang mana hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum menyelesaikan tugas-tugas yang harus dipenuhi sebagai persyaratan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan adalah: Bagaimana Proses Perencanaan dalam Penyusunan

Rancangan APBDes di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan APBDes di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyusunan Rancangan APBDes yang belum sesuai dengan prosedur standar pengelolaan keuangan desa.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pengarah, pelatihan dan bimbingan kepada aparatur.

4. Manfaat Penelitian.

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada bidang kajian Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah serta sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk penelitian bidang pedesaan.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat, sebagai salah satu masukan guna melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau.
- b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta

kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. TEORI DAN METODOLOGI

2.1. Teori

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

James C. Van horne dalam Kasmir (2010:5) mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan Perolehan, Pendanaan, dan Pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan dalah berkuat disekitar:

1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya.
2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai.

3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Suad Husnan (1998:4) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan menjelaskan pengertian Manajemen Keuangan yaitu *“pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan”*. Dalam pernyataan ini, jelas diungkapkan bahwa unsur pertama dalam Manajemen Keuangan adalah Perencanaan. Seperti yang di jelaskan menurut pengertian para ahli tersebut, maka penulis simpulkan pengertian manajemen keuangan adalah seluruh proses dalam pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa, yang berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Keuangan Desa di kelola oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk :

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. menetapkan bendahara desa
4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

2.1.2. Pengertian Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan dampak pada

perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Tentunya, hal tersebut berimbas pula dalam pengelolaan penganggaran keuangan desa, sebagai pihak penerima dana perimbangan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dan dikelola dengan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

2.2.Manajemen Perencanaan

Didalam literatur yang peneliti dapatkan, banyak sumber yang

mendefinisikan pengertian manajemen perencanaan. (Wiludjeng: 2007) mendefenisikan pengertian perencanaan adalah “*Proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan bersama*”. Siswanto (2008: 42) menjelaskan pengertian perencanaan yaitu “*suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai*”. Hayashi (Siswanto:2008) mendefenisikan perencanaan sebagai “*suatu proses bertahap dari tindakan yang terorganisasi jembatani perbedaan antara kondisi yang ada dan aspirasi organisasi*”. Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008) menjelaskan bahwa perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh menejer. Aktivitas tersebut adalah:

1. Prakiraan (*Forecasting*)

Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/memeperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan

atas fakta yang telah diketahui.

2. Penetapan Tujuan (*establishing objective*)

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.

3. Pemrograman (*programming*)

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, dan untuk menetapkan urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.

4. Penjadwalan (*scheduling*)

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

5. Penganggaran (*budgeting*)

Merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan

tentang sumber daya keuangan (*financial resources*) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

6. Pengembangan Prosedur (*developing procedure*)

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

7. Penetapan dan Interpretasi Kebijakan (*establishing and interpreting policies*)

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang berulang demi suatu organisasi.

Dari penjelasan diatas, maka berikut adalah langkah-langkah penting dalam pekerjaan perencanaan:

a. Menjelaskan permasalahan

- b. Usaha untuk memperoleh informasi terhandal tentang aktivitas yang direncanakan
- c. Analisis dan klasifikasi informasi
- d. Menentukan dasar-dasar perencanaan dan batasan
- e. Menentukan rencana berganti
- f. Memilih rencana yang diusulkan
- g. Membuat urutan kronologis mengenai rencana yang diusulkan

Dari Teori diatas, peneliti tertarik menggunakan teori Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008). Alasan peneliti lebih tertarik menggunakan teori Louis A. Allen dikarena teori ini dinilai lebih relevan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008) terdapat elemen-elemen yang berkaitan erat dalam penyusunan rancangan APBDes. Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008) menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dari Prakiraan (*Forecasting*), Penetapan Tujuan (*establishing objective*), Pemrograman (*programming*), Penjadwalan (*scheduling*), Penganggaran (*budgeting*),

Pengembangan Prosedur (*developing procedure*), Penetapan dan Interpretasi Kebijakan (*enstablishing and interpreting policies*) yang mana, menurut analisis peneliti, teori ini dinilai lebih relevan terhadap masalah yang akan penelit teliti, jika dibandingkan dengan tori lain.

3. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan jawaban-jawaban dari temuan penelitian metode kualitatif, memberikan bukan hanya sekedar angka-angka namun penjelasan lebih mendalam berkenaan dengan masalah yang tertjadi di lapangan. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam, apa saja faktor-faktor permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan dampak-dampak masalah perencanaan keuangan di lapangan.

Lebih dalam lagi penulis ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan keuangan Desa berkaitan dengan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, yang setiap Tahunnya timbul fenomena-fenomena sebagai akibat dari lemahnya fungsi-fungsi manajemen pengelolaan keuangan di desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tinting Boyok secara garis besar telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan optimal. Salah satu elemen manajemen keuangan yang belum optimal berada pada tahap perencanaan. Terbukti dengan timbulnya fenomena pembekuan anggaran Alokasi Dana Desa Periode 2(dua) 2013 sebagai akibat terlambatnya pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mana didalamnya terdapat lampiran

pertanggungjawaban keuangan pada periode sebelumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya fenomena tersebut adalah, masih lemahnya pemahaman pejabat pengelola keuangan desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai akibat dari timbulnya fenomena tersebut tentunya akan berdampak dengan pembangunan di Desa Tinting Boyok.

Selain itu, yang menjadi hambatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok adalah terjadinya masa transisi kepemimpinan kepala desa di Desa Tinting Boyok. Hal tersebut berpengaruh dalam tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja karena pegawai baru di Kantor Desa Tinting Boyok baru beradaptasi dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahap sebelumnya.

B. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau sudah sesuai dengan prosedur standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh.
- b. Pembangunan di Desa Tinting Boyok masih belum mencapai harapan, hal tersebut dikarenakan sumber pendapatan desa hanya mengharapkan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa ataupun aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa

- c. Tidak terselesainya beban tugas pelaporan pertanggungjawaban keuangan di periode 1(pertama) Tahun 2013.

2. Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tinting Boyok masih membutuhkan pengarahannya yang lebih intensif dari pemerintah Kabupaten, sehingga dapat meminimalisir adanya masalah dalam pengelolaan keuangan di Desa Tinting Boyok.
- b. Pemerintah Desa Tinting Boyok harus lebih terbuka antar sesama aparatur desa, maupun terhadap masyarakat dan saling membantu dalam mengelola keuangan desa, sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman sertadapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada pemerintah desa tepat waktu.
- c. Tidak ditemukannya berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Disarankan kepada pemerintah Desa agar segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehingga rencana pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.

data sebagai pendukung guna memecahkan masalah yang penulis teliti.

3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan anggaran di Desa Tinting Boyok. Dikarenakan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya bersifat terbuka, sehingga penulis harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkaitan dengan keuangan desa.
- b. Akses jalan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten tidak begitu baik, sehingga penulis harus menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan ketika melaksanakan penelitian.
- c. Tidak tersedianya arsip desa sehingga penulis merasa kesulitan dalam memperoleh

DAFTAR PUSTAKA

- Husnan, Suad., Enny Pudjiastuti. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Kencana Prenda Media Group.
- Moloeng, 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Aminirin, Tatang. 2010. *Pokok-pokok Teori Sistem* Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sidoarjo: PT Rineka Cipta.
- Ritonga, 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Safi'i, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press
- Siswanto, 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alfabeta.
- — —. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung CV Alfabeta
- Surjadi. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung:Alumni.
- Sutopo. 2000. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: LAN
- Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Mandar Maju.
- Tohardi. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung : Mandar Maju.
- Thoha, Miftah.2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Strategis (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**
- Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang **Desa**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2013 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**
- Peraturan Desa Tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinting Boyok Tahun 2013**
- Profil Kecamatan Sekadau Hulu Tahun 2013
- Profil Desa Tinting Boyok Tahun 2013
- Penelitian, Naskah Akademik dan Makalah:**
- Sunta, Mathilda. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang*. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sumber Dokumen dan Perundang-Undangan:

Surya, Khetrin. 2013. *Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan*. Pontianak, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan.

Sutiyono. 2009. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008)*. Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Depi Sisianto
NIM / Periode lulus : E42010065 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : xxxlost@ymail.com / 089693221821

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TINTING BOYOK
KECAMATAN SEKADAU HULU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....*IP*.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 22 Januari 2015

(DEPI SISIANTO)